

**Ekonomi Berbasis e-Nagari**  
**Skenario Sumbar Menyambut Otonomi Daerah Sekaligus Mengantisipasi**  
**Globalisasi Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani**  
Oleh : Zukri Saad St. Majo Basa

---

Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Masyarakat Madani/ Civil Society, yang diselenggarakan oleh Civil Society Support & Strengthening Program - CCSP , Bogor, 24 - 28 September 2001. Pemakalah adalah Petani Dataran Tinggi, Konsultan Pembangunan, Ketua Koperasi Ekuator Minang Media dan pengelola Mimbarminang.com.

---

### **Pengantar**

Di propinsi Sumatera Barat “masih tersisa” suatu sistem komunal yang terbukti efektif menampilkan citra kemandirian rakyat, demokrasi dan martabat bangsa. Dinamika yang berlangsung di nagari-nagari sedemikian rupa membangun suatu kondisi interaksi efektif antar berbagai pihak berkepentingan (stake-holders) dalam suatu tata nilai yang penuh kesetaraan, bersemangat komunal dan menghasilkan sinergi berkelanjutan. Mungkin itu yang sekarang disebut-sebut sebagai masyarakat madani (civil society).

Revitalisasi Nagari merupakan kombinasi revitalisasi modal sosial yang masih tersisa di nagari, partisipasi seluruh anak nagari dengan pemberdayaan nagari melalui penguasaan teknologi informasi. Kombinasi ini dipilih seiring pemberlakuan UU 22/99 tentang otonomi daerah secara luas sekaligus upaya antisipatif daerah menyongsong pasar bebas, liberalisasi ekonomi dan globalisasi.

### **1. Memandirikan “Nagari” sebagai satu kesatuan unit pembangunan**

Nagari sebagai sebuah komunal merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatra Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya (disebut ulayat adat), mempunyai harta kekayaan sendiri (harta benda nagari), berhak mengatur dan mengurus ruhamtanganya serta memilih pemerintahannya.

Sistem komunal bernagari di Sumbar berlangsung turun temurun, bertumbuh secara alamiah dan akhirnya berakumulasi sebagai budaya dan kultur selingkar nagari. Dinamika ini sangat efektif sehingga berbagai aktifitas pembangunan, khususnya di awal-awal kemerdekaan maupun di awal orde baru, diselenggarakan secara mandiri oleh anak nagari dengan dukungan minimal dari pihak lain (baca: pemerintah). Berbagai proyek publik (fisik sarana prasarana maupun pengembangan SDM) telah mampu direncanakan, dilaksanakan, dibiayai dan dipelihara oleh masyarakat nagari. Semangat komunal bersinergi efektif sehingga apapun tantangan eksternal telah mampu dilalui secara efektif sehingga nagari eksis sejak dahulu.

Seluruh wilayah di propinsi Sumatera barat telah terbagi habis dalam bangun nagari-nagari, yakni terdiri dari 543 nagari-nagari.

Sistem yang demikian efektif ini kemudian dihancurkan leburkan, luluh lantak, dengan dipaksakannya sistem lain agar seragam melalui UU 5/79 dimana nagari-nagari dipecah-pecah menjadi bentuk pemerintahan desa. Dengan terpecahnya nagari, dalam kurun waktu 20 tahun saja, berbagai kondisi mandiri berkedaulatan tentu saja mendekati musnah. Nuansa komunal bernagari dikerdilkan sampai pada posisi ritual adat, prosesi perkawinan saja atau hanya perangkat pendukung saja dari pemerintahan Desa, kecamatan atau kabupaten. Akses terhadap sumberdaya alam, pengelolaan ulayat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah pusat yang sentralistis.

Barulah di awal era reformasi, melalui kebijakan populis yang ditawarkan pemerintah melalui diundangkannya UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pemberian otonomi yang luas kepada Daerah Tingkat II serta UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah. Propinsi Sumatera Barat memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan kreatif membangun kemandirian rakyat.

Hal-hal spesifik yang segera dilakukan setelah pemberlakuan UU itu antara lain mengembangkan penerapan "daulat rakyat" dengan memfasilitasi bertumbuhnya kembali semangat komunal ber"nagari" sebagai perwujudan kedaulatan di tingkat paling dasar. Saat ini sedang dipacu berbagai prakarsa masyarakat yang menginginkan "kembali ke pemerintahan nagari" agar kedaulatan secara sosial proporsional kembali ketangan anak nagari.

Peran pemerintahan sudah mendekati rampung dengan dikeluarkannya Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 9/ 2000 pada 16 Desember tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Perda ini diiringi oleh Perda yang lebih detail tingkat Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh langkah-langkah serius berupa implementasi kongkrit. Sampai saat ini hampir seluruh Kabupaten sedang menyelenggarakan tahapan-tahapan kembali ke sistem pemerintahan Nagari.

Untuk kembali ke pola nagari ini diperkirakan akan tidak mudah. Diperlukan berbagai pendekatan intensif, serius dan metodologis agar "penyelamatan kembali modal sosial" nagari memberikan hasil maksimal. Dibayangkan akan ada proses bertahap dan terpadu dalam merekayasa ulang wujud nagari yang legitimasinya menyeluruh serta diakui oleh segenap anak nagari, baik yang menetap di kampung halaman maupun yang telah mencari penghidupan di rantau (revitalisasi nagari dalam konteks kekinian). Saat ini penduduk Sumatera barat sekitar 4,5 juta orang sedangkan anak nagari yang berdomisili di rantau mendekati 7,5 juta orang. Mereka ada dan eksis di kantong-kantong komunal perantauan, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam pengembangan infrastruktur publik, saat ini di 543 nagari-nagari sedang berlangsung proses demokrasi pemilihan Badan Perwakilan Nagari (parlemen nagari -representasi suku-suku yang eksis di nagari-nagari); Wali Nagari (merupakan perangkat eksekutif nagari yang dipilih secara langsung) serta Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS - semacam Badan Penasehat yang menghimpun serta mensinergikan berbagai potensi anak nagari, termasuk yang berdomisi dirantau serta pendatang yang menetap di selingkar nagari).

Mengingat hampir 20 tahun dibawah suasana interaksi yang sentralistik era orde baru, tentu perlu fase inkubasi yang cukup untuk menghadirkan komitmen sosial ber-nagari baru yang menampilkan sinergi produktif seluruh potensi nagari, baik SDM, ulayat nagari/SDA, teknologi, relasi sosial dan ekspektasi keberlanjutan hidup komunal menuju kesejahteraan bersama. Dalam masa inkubasi ini, pemerintahan Kabupaten menaglokasikan sejumlah dana operasional nagari yang diistilahkan sebagai DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) untuk membiayai pelayanan publik pemerintahan terendah. Dana dukungan ini tentu saja hanya cukup untuk membiayai perangkat eksekutif nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari. Infrastruktur lainnya mesti digali sendiri oleh anak nagari.

Untuk menuju kemandirian nagari, pemantapan kedaulatan sosial seyogyanya berlangsung simultan dengan bertumbuhnya kedaulatan ekonomi melalui pilar koperasi (agar tercermin dan terjamin partisipasi dan persamaan hak ekonomi seluruh anak nagari, tanpa kecuali). Menghadirkan Koperasi Nagari yang memiliki legitimasi kultural, representatif dan modern tentulah pekerjaan rumah seluruh pihak anak nagari di seantero propinsi dan perantauan. Artinya Koperasi Nagari yang menjadi unit ekonomi penunjang infrastruktur sosial bernagari, khususnya melalui minat partisipatoris dan pelayanan publik dari pemerintah daerah.

Pendapatan nagari melalui koperasi nagari akan digunakan sepenuhnya membangun nagari, membiayai perangkat nagari yang tidak dibiayai oleh pemerintah, mengembangkan infrastruktur sosial dan ekonomi, sarana prasarana, pengembangan SDM dll.

Untuk itu, sesesainya urusan perangkat nagari, akan berlangsung musyawarah anak nagari (melibatkan mereka baik yang dikampung maupun dari perantauan) untuk memecahkan persoalan pembiayaan infrastruktur nagari dan melanjutkan pembangunan. Sinergi kampung-rantau nampaknya adalah kemungkinan paling besar untuk memandirikan nagari secara ekonomi. Soal lanjut adalah bagaimana menyatukan potensi rantau-kampung ini dalam sebuah sinergi yang produktif berkelanjutan.

Mengingat potensinya yang serba kecil dan tersebar diseantero propinsi, perlu pula diprakarsai pembangunan jaringan antar nagari-nagari (nagari networking) agar pada saatnya diperoleh "posisi tawar politis" terhadap kebijakan publik apapun dan sinergi berbagai potensi ekonomi, khususnya menghadapi pasar bebas dan globalisasi.

Dapat dimimpikan bahwa setelah program revitalisasi berlangsung, kelak nagari akan menjadi suatu unit yang sangat mandiri secara sosial politik dengan infrastrukturnya yang legitimatif kultural dan mandiri pula secara sosial ekonomi melalui berbagai pemberdayaan ekonomi nagari.

Posisi eksekutif nagari kelak akan dimotori oleh anak-anak nagari yang berwawasan global karena perannya akan lebih sebagai Chief Executive Officer/CEO untuk berbagai interaksi ekonomi produktif memanfaatkan aset ulayat nagari.

Posisi Ninik Mamak pemangku adat sangat legitimate karena diangkat berdasarkan kapasitas yang sesuai dan akan bekerja memelihara komitmen sosial budaya nagari. Di bidang keagamaan, implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi nafas kehidupan yang inheren dengan seluruh bidang kehidupan di nagari, yang difasilitasi oleh kehadiran dan kerja keras Khatib Nagari berikut staf berkapasitas tinggi.

Legislatif Nagari akan berperan mengembangkan masterplan pembangunan nagari, mengendalikan pelaksanaan dan melakukan pengawasan, terdiri dari SDM nagari potensial yang merupakan kombinasi anak nagari yang masih berdomisili di kampung dengan yang menetap di rantau (mengingat makin lancarnya hubungan transportasi).

Seluruh dinamika kehidupan nagari dibiayai oleh keuntungan yang diperoleh karena pemberdayaan infrastruktur ekonomi nagari. Memanfaatkan ulayat nagari, mengefektifkan SDM nagari dimanapun domisilinya, pengelola infrastruktur nagari dengan kualitas memadai dan membangun aliansi strategis dengan nagari lain serta kelak berinteraksi dengan masyarakat global adalah citra nagari di masa depan.

## **2. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Nagari**

Skenario Pemberdayaan ekonomi nagari di Sumatera Barat merupakan antitesa dari pembangunanisme yang dianut pengelola orde baru atau memang hadir dari kesadaran yang tumbuh akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia.

Pemberdayaan ekonomi nagari merupakan reorientasi dari bentuk penggalan sumberdaya pembangunan yang berasal "dari pertumbuhan" yang sentralistik pengelolaannya ke bentuk partisipatoris desentralistik yang mengutamakan perolehan sumberdaya pembangunan "bersama pertumbuhan".

Pemberdayaan ekonomi nagari tentulah dapat kita nyatakan sebagai usaha memperoleh nilai tambah sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan nagari secara signifikan dan berkelanjutan. Prinsipnya publik secara bersama menikmati buah segar pembangunan, bersama tinggal landas dan tak seorangpun boleh tertinggal di landasan.

Pemberdayaan ekonomi nagari dicirikan oleh terbukanya peluang secara luas bagi seluruh sektor usaha yang dikelola anak nagari untuk mengakses berbagai sumber daya pendukung usahanya (potensi alam, relasi internasional dan sumber dana). Demikian pula terbuka pula seluas-luasnya peluang bagi unit usaha anak nagari untuk menentukan jenis aktifitas ekonomi yang diminatinya dan sama sekali bebas dari intervensi manapun dalam mengambil keputusan menyangkut usaha yang dikelolanya. Intinya seluruh anak nagari tanpa kecuali berpeluang untuk berusaha bagi kepentingan hidup dan kesejahteraannya. Berusaha secara bebas, kreatif dan merdeka adalah hak yang sah dari setiap anak nagari.

Pemberdayaan ekonomi nagari tercermin dari bebasnya anak nagari untuk memilih dan mengembangkan organisasinya secara aspiratif, yang tentunya mencerminkan keadilan dan pemerataan (dalam konteks ini nampaknya institusi ekonomi Koperasi adalah pilihan satu dan satu-satunya karena menjamin re-distribusi keuntungan).

Pemberdayaan ekonomi nagari harus berlangsung dalam suasana kondusif, bebas hambatan birokrasi dan intervensi apalagi dominasi berbagai pihak lainnya. Artinya akan bertumbuh subur iklim usaha yang sangat terbuka/fair dimana peran pemerintah sebagai pengelola negara lebih bersifat memfasilitasi, membangun fungsi-fungsi manajerial publik yang efektif-efisien dan lebih banyak tut wuri handayani.

Pemberdayaan ekonomi nagari berlangsung dalam suasana dunia yang sedang berubah cepat dan kian cepat. Artinya dampak akibat perubahan itu suka atau tidak suka akan melanda nagari-nagari sehingga perlu diantisipasi secara efektif. Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari kesatuan pemberdayaan lainnya yang intinya agar nagari secara komunal "tetap dalam suatu kesatuan budaya, sosial, ekonomi, dan tetap menjadi tuan rumah diulayat adatnya serta survive menyongsong arus kecenderungan globalisasi". Untuk itu penguasaan teknologi dan simbol-simbol moderen mutlak perlu dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan nagari-nagari.

### 3. Jaringan teknologi Informasi Nagari On-line ("e-Nagari").

Kehadiran milenium III tidak bisa disambut dengan kesibukan diskusi dan memperkirakan dampak globalisasi belaka. Ia perlu usaha kongkrit dan terukur dalam bentuk antisipasi yang cerdas, yang membawa rakyat Sumbar keluar sebagai pemenang. Untuk itu perlu dibangun suatu jaringan sistem informasi komunikasi canggih yang "on-line" dengan sistem global. Intinya pengembangan sistem jaringan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sentra-sentra kemandirian usaha masyarakat nagari sehingga terbentuknya jaringan pasar domestik, regional, nasional dan internasional untuk kepentingan anak nagari sebagai pelaku usaha. Jaringan ini dikembangkan agar anak nagari siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga internasional.

Namun untuk mengintegrasikan potensi nagari sehingga ditemukan sinergi maksimal, sistem kepemilikan jaringan haruslah berbentuk koperasi yang bersifat publik. Jaringan tersebut menerapkan sistem open consumer society cooperatives (koperasi masyarakat konsumen terbuka), dimana para konsumen adalah sekaligus pemilik usaha dan layanan yang dinikmatinya. Hal ini akan menumbuhkan suatu siklus kinerja usaha yang paling efisien karena pembeli adalah juga pemilik sebagaimana iklan di banyak negara yang menganut sistem kesejahteraan sosial masyarakat (welfare state) dengan motto: "belanja kebutuhan sehari-hari di toko milik sendiri". Istilah sejenis berlaku di Koperasi Ekuator yang mengembangkan pendekatan "sapi haji masuk kebun haji", yakni seluruh anak perusahaan walau berbadan hukum PT namun tetap bersemangat dan memihak koperasi.

Sistem ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling ajar, serta jaringan sumber daya lainnya seperti hasil riset dan teknologi, berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijaksanaan dan intelijen usaha, dsb. Pengembangan jaringan dilakukan dengan mengutamakan pendekatan yang adil dan merata bagi setiap anak nagari maupun warga negara pada umumnya, agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang selama Orde Baru disudutkan dan disebut sebagai beban pembangunan. Dalam hal ini sistem ekonomi jaringan berkontribusi mempercepat laju pencapaian demokrasi ekonomi sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Bila akses terhadap berbagai sumber daya dilakukan secara bebas, maka berbagai ketidak-seimbangan aliran informasi bisa diatasi. Bila aliran informasi dimaksud lancar kepada masyarakat, maka akan bertumbuh pula kontrol yang efektif sehingga praktek dis-informasi sektor keuangan misalnya dapat diberantas habis.

Pada akhirnya, ekonomi berbasis jaringan adalah suatu pendekatan perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik itu produsen, konsumen, service provider, equipment provider, cargo dan lain-lain dalam jaringan yang terhubung secara elektronik. Dengan melakukan pembenahan di bidang "flow of information (aliran informasi)" dan "flow of money (aliran dana)" sebagai implikasi logis perubahan sistem sentralistik ke otonomi, maka diharapkan secara alami akan bertumbuh "flow of goods and services (aliran barang dan jasa)" dalam bentuk perdagangan antar nagari/regional sampai internasional berdasar pada potensi dan komoditi unggulan nagari masing-masing.

Dalam rangka pembenahan ini perlu dibangun di seluruh nagari simpul jaringan elektronik yang bertugas secara umum sebagai Pusat Interaksi Komunikasi (PIK) jarak jauh serba guna (Multi-purpose Community Telecenter) yang berperan memfasilitasi anak nagari untuk mengakses informasi dan berkomunikasi, seperti informasi produksi, pasar, perkreditan, dukungan teknologi, konsultasi usaha, dll.

Seluruh simpul tiap nagari akan dihubungkan secara elektronik melalui jaringan teknologi informasi (internet). Dengan demikian, jaringan bersifat "on-line" ini diharapkan akan menjadi infrastruktur pendukung terpenting bagi dunia usaha masyarakat Sumatera Barat Baru yang berkeadilan dan merata. Wujudnya berupa suatu sarana yang bisa diakses oleh seluruh anak nagari untuk berbagai kebutuhan hidupnya, unit usahanya dan untuk memperoleh gambaran peluang masa depannya.

Sarana ini akan menjadi detak jantung kehidupan produktif rakyat nagari, dimana pada tahap awal akan dikelola oleh konsultan pembangunan beridealisme tinggi dengan kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan nagari. Diperkirakan selama 5 tahun pertama, sarana ini akan merupakan penyerap sumber daya/cost centre, namun ditahun ke enam dan seterusnya akan berkembang menjadi penghasil sumber daya/profit centre. Tentulah tentu seiring dengan tingkat kemakmuran ekonomi rakyat nagari.

Pada tahap tingkat kemakmuran tertentu sudah dicapai, anak nagari sudah terbiasa dengan sarana internet ini, maka peran Pusat Interaksi Komunikasi akan meningkat menjadi Terminal Interaksi (Gateway/Local Host/Service Provider) mempermudah hubungan anak nagari secara individual dengan global.

Sarana ini adalah pilihan strategis untuk membawa anak nagari secepat mungkin berinteraksi dengan global (termasuk golongan cyber communities), sehingga kelak tidak akan canggung berinteraksi dengan pendatang dari negara lain saat perdagangan bebas dibuka. Anak nagari yang tidak lagi "gagap teknologi" akan bergaul secara setara, bermartabat dan percaya diri dengan pendatang bangsa-bangsa lain.

#### **4. Agenda pengembangan IT di Sumatera barat**

Sejak 19 April 1999 telah diluncurkan MimbarMinang.Com oleh Koperasi Ekuator Minang Media (KEMM) sebagai portal etnis yang berambisi untuk mengintegrasikan 12 juta masyarakat Minangkabau si dunia dalam satu jaringan elektronik. Portal yang memakai server swasta di San Fransisco ini dilengkapi dengan breakingnews dan menjadi ajang hosting dan banner dari seluruh komponen masyarakat Sumbar dimanapun berada. Baik pemerintah maupun swasta. Akhir-akhir ini Mimbarminang.com sudah diakses oleh ribuan pengakses dengan hits rata-rata diatas 30.000 perhari.

Mimbarminang.com berambisi menjadi portal yang bersifat one-stop information services untuk seluruh informasi tentang etnis Minangkabau dan propinsi Sumbar umumnya. Portal ini akan menjadi simpul informasi antar nagari dan hubungan nagari dengan anak nagari di perantauan serta masyarakat cyber secara umum. Berbagai transaksi informasi, baik tentang potensi SDA; SDM; kelembagaan; pariwisata; keuangan; produksi; perdagangan; transportasi; budaya; teknologi maupun apa saja disediakan database-nya secara lengkap melalui portal ini.

Untuk itu beberapa pekerjaan sudah diawali, antara lain :

##### **4.1. Internet dan Intranet Pemerintah kabupaten - Kota.**

Saat ini KEMM sedang mendukung berbagai instansi pemerintah, baik di propinsi maupun di kabupaten kota untuk mengembangkan sistem manajemen informasi berbasis WEB dan mengembangkan sistem intranet untuk internal kelembagaan pelayanan publik oleh pemerintah. Pada saatnya, siapa saja dapat mengakses ke data-base pemerintah dengan tingkat validitas tinggi dan pelayanan publik akan menjadi sangat cepat dan efektif.

##### **4.2. Nagari On-line (e-Nagari)**

Seiring dengan pengembangan manajemen informasi mendukung pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kota, di tiap-tiap nagari akan diinstal satu unit PIK yang didukung oleh SDM yang dididik

khusus untuk itu. PIK yang akan dikelola secara profesional ini bersifat cost-center pada 3 tahun awal, dimana sedikitnya 3 orang pengelola akan bekerja secara penuh waktu untuk mengisi data akurat potensi nagari dan akan mengemaskan keunggulan potensi nagari untuk di sinergikan serta dikembangkan lebih lanjut. PIK akan memiliki berbagai peran efektif, termasuk membiasakan masyarakat nagari berbudaya informasi untuk kelak loncat menjadi masyarakat informasi. PIK akan berfungsi menjadi pusat transaksi informasi produksi; informasi pasar; informasi antar nagari; komunikasi-informasi antar anak nagari rantau-kampung serta informasi dan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak luar/global.

#### 4.3. Jaringan Pembiayaan Ekonomi Nagari

Di masa Orde Baru, upaya pengembangan lembaga pembiayaan ekonomi nagari pernah menunjukkan keberhasilan, dimana bertumbuhnya LPN (Lumbung Pitih Nagari) di nagari-nagari. Diawali dengan usaha kredit simpan pinjam yang mandiri kemudian dilegitimasi oleh dukungan pemerintah melalui tambahan kredit lunak dari Bank Nagari (d/h BPD Sumbar yang mendapat dukungan kredit lunak melalui GTZ Jerman). Upaya ini berlangsung cukup lama, sampai kemudian ditingkatkan menjadi BPR bersamaan dengan dukungan Lembaga Gebu Minang. Saat ini lebih dari 80 BPR beroperasi di nagari-nagari di Sumbar. Terakhir BPR membangun kerjasama dengan PT. PNM dalam pemupukan modalnya.

Namun harus diakui, lembaga pembiayaan “versi pemerintah” ini tidak cepat perkembangannya, malah cenderung merana. Salah satu penyebab utama adalah keberadaannya tidak begitu legitimate secara kultural dibanding dengan LPN dahulu. Demikian pula tak ada kejelasan manfaat bagi nagari, misalnya dalam bentuk redistribusi keuntungan untuk pembangunan nagari.

Intinya LPN versi masa depan ini merupakan unit lembaga keuangan non-Bank dimana sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Koperasi Nagari yang memiliki jaringan on-line serta bersinergi dengan lembaga sejenis di seluruh nagari-nagari.

Dengan demikian dana nagari diserap oleh nagari-nagari. LPN yang menggunakan fasilitas e-nagari ini memiliki persyaratan:

- Memiliki legitimasi kultural
- Mendapatkan dukungan kuat dari anak nagari, terutama dari rantau
- Menjamin redistribusi untuk anak nagari
- Bervisi global
- Sepenuhnya untuk pembiayaan nagari-nagari di Sumbar, artinya tidak boleh ada capitas flight keluar Sumbar.
- Pengelolaan moderen memanfaatkan kecanggihan teknologi
- Membiayai proyek-proyek keunggulan nagari (one village one product)

Dalam rangka memupuk permodalan, LPN akan menyerap berbagai sumber dari anak nagari yang tersebar seantero bumi, berbagai hibah baik dari pemerintah maupun dari mana saja serta kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak luar yang ingin berbisnis dengan nagari-nagari.

#### 4.4. Jaringan saling ajar (e-sekolah dan e-surau)

Merupakan jaringan antar dan inter nagari berkaitan dengan pembinaan SDM, baik dari segi pendidikan keilmuan dan teknologi maupun berhubungan dengan pembinaan mental spiritual agama islam. Sistem jaringan ini merupakan sarana saling ajar berkaitan dengan falsafah hidup anak nagari “Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah (ABS-SBK).

Mengintegrasikan seluruh sekolah, madrasah dan pesantren serta perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga pendidikan luar sekolah, kursus-kursus serta berbagai sarana pengembangan SDM lainnya.

#### 4.5. Jaringan usaha berbasis anak nagari

Merupakan integrasi anak nagari kampung rantau untuk produksi dan pemasaran komoditi unggulan nagari-nagari. Sejak april 2001 telah terbentuk International Minang Network (IMN) yang diniatkan untuk mengembangkan usaha pemasaran produksi nagari. IMN digagas oleh LSM BIS (Business Information Service) yang berbasis di Bukittinggi dengan perantau dari Malaysia dan Singapura. IMN

yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan dunia usaha di Sumbar saat ini sedang merampungkan kelembagaannya dan mekanisme kerja. IMN merencanakan akan mendirikan simpul-simpul outlet pemasaran produk unggul nagari di Kuala Lumpur, negeri sembilan dan di Singapura. Outlet akan dikelola dengan mekanisme bisnis profesional yang bermekanisme on-line.

Seluruh jaringan interaksi diatas dituanrumahi oleh regional host berlabel e-Nagari.

#### 5. Model Pengembangan Ekonomi Nagari

- Dialog partisipatoris anak nagari (termasuk yang sudah merantau) untuk merumuskan komitmen komunal baru yang antisipatif terhadap perubahan nasional dan tantangan global (meliputi berbagai infrastruktur sosial, ekonomi, politik dan budaya).
- Berupaya mewujudkan implikasi kebijakan komunal dengan antara lain :
  - Mengukuhkan keberadaan Koperasi Nagari sebagai infrastruktur ekonomi nagari sehingga memiliki legitimasi kultural dan dukungan penuh anak nagari.
  - Identifikasi aset nagari dan mengupayakan kepemilikan legitimatif ulayat nagari (bagi nagari yang masih memiliki ulayat) atau mengajukan HGU kepada pemerintah untuk dikembangkan menjadi aset produktif nagari.
  - Menetapkan secara mantap dan terukur jenis ekonomi produktif yang akan dikembangkan untuk memperoleh pembiayaan nagari (one village one product). Kegiatan pengembangan ekonomi ini diharapkan akan menghasilkan produk unggulan dengan brand image nagari yang akan merambah pasar regional, nasional dan global.
  - Mengembangkan SDM potensial nagari untuk mengelola unit produksi nagari
  - Menggali dan mengakumulasi dukungan finansial dari anak nagari yang mampu atau mengupayakan permodalan dengan cara lain (ke lembaga dana/ nagari bonds?).
  - Mendirikan Pusat Interaksi Komunikasi (berikut perangkat software/hardware dan SDM pendukungnya) untuk membangun ekonomi jaringan antar nagari, regional, nasional dan global. PIK akan menjadi tuan rumah bagi seluruh urusan jaringan nagari, baik di bidang transaksi informasi, pembiayaan, saling ajar, usaha, maupun usaha fundamental yakni menggiring anak nagari berwawasan jaringan (cyber communities).
  - Mendirikan sarana pra-sarana pendukung unit ekonomi produktif nagari (pra-industrialisasi) yang diawali dengan pendirian lembaga keuangan nagari sebagai sarana untuk menggali dan mengakumulasi potensi anak nagari keseluruhan. Lembaga keuangan ini juga kelak akan berinteraksi dengan lembaga keuangan manapun dalam penyelenggaraan skim pembiayaan proyek-proyek produktif nagari. Lembaga keuangan nagari merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Koperasi Nagari.
  - Sinergi unit produktif nagari-nagari seluruh Sumatera Barat dalam bentuk jaringan produksi dan pemasaran agar tercapai skala ekonomi yang menguntungkan.
  - Sinergi infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi nagari akan menampilkan kemandirian nagari secara berkelanjutan.
  - Kemandirian Nagari Adalah wujud partisipatif anak nagari dalam pembangunan Sumatera Barat di era otonomi, sekaligus kalau boleh menyebutnya sebagai masyarakat madani.

#### Produk Generasi

Kemandirian Sumatera Barat di Milenium III ditunjukkan oleh partisipasi anak nagari melalui pembangunan partisipatoris yang bercirikan antara lain :

- Keberadaan Nagari yang mandiri secara menyeluruh di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik mendorong rakyat Sumbar berpartisipasi secara bebas dan merdeka dalam konstelasi politik regional, nasional dan internasional. Artinya pola kemandirian nagari mendorong pertumbuhan budaya demokratis yang sehat dan berkeadilan dalam mengantisipasi globalisasi.
- Kemandirian ekonomi nagari ditunjukkan dengan perkembangan eksponensial berbagai produk nagari berkeunggulan, didukung oleh Pusat Interaksi Komunikasi Serba Guna, sehingga persaingan pasar di era global dapat dihadapi dengan taktis dan menguntungkan rakyat dalam jangka pendek, menengah dan panjang (sustainable economic development).
- Kemandirian Sumatera Barat Baru adalah Produk Generasi.

Padang, 10 September 2001